

MODERASI BERAGAMA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN: SUATU KAJIAN ATAS ALTERASI KEBIJAKAN PENDIRIAN RUMAH MODERASI BERAGAMA

Abdul Rosyid

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani
abdulrosyid@stai-binamadani.ac.id

ABSTRAK

Muncul perbedaan sikap di kalangan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) terhadap kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia tentang moderasi agama, apakah dengan model *isolated subject* (mata kuliah tersendiri) atau *integrated subject* (bagian mata kuliah yang sudah ada). Penelitian ini berpandangan bahwa kebijakan moderasi beragama yang dikeluarkan pemerintah mendapatkan respon akademis dan sosial yang berbeda-beda dari civitas perguruan tinggi. Tujuan utama studi ini adalah menyuguhkan pemetaan dan analisa respon PTKI negeri dan swasta terhadap implementasi kebijakan moderasi beragama. Beberapa penelitian terdahulu telah memaparkan bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai suasana dan budaya akademik yang unik dan tidak sama satu sama lain. Keunikan tersebut lahir dari kondisi sosio-kultural, visi-misi, dan kurikulum yang diterapkan. Senada dengan hal tersebut, perguruan tinggi tidak dapat mengimplementasikan kebijakan pemerintah tanpa pertimbangan akademik yang matang, karena akan berefek pada perubahan sektor dalam perguruan tinggi lainnya. Namun demikian, di sisi lain, perguruan tinggi diperkaya dengan adanya sumber daya yang bermacam-macam yang berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan dan sikap. Oleh karena itu, menjadi studi yang penting untuk menganalisa faktor-faktor yang melatar belakangi perbedaan sikap PT dalam melaksanakan kebijakan moderasi agama di perguruan tinggi.

Kata Kunci: *Alterasi, Implementasi, Moderasi Beragama, Perguruan Tinggi Agama Islam*

Abstract: There is a difference in attitudes among Islamic religious universities (PTKI) towards the policy of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia regarding religious moderation, whether with the isolated subject model (separate courses) or integrated subject (part of existing courses). This research is of the view that the religious moderation policy issued by the government has received different academic and social responses from the university community. The main objective of this study is to present a mapping and analysis of the response of public and private PTKI to the implementation of religious moderation policies. Several previous studies have explained that each university has a unique academic atmosphere and culture and is not the same as each other. This uniqueness is born from the socio-cultural conditions, vision-mission, and curriculum applied. In line with this, universities cannot implement government policies without careful academic consideration, because it will have an effect on changing sectors in other universities. However, on the other hand, universities are enriched with the existence of various resources that have the potential to cause differences in views and attitudes. Therefore, it is an important study to analyze the factors behind the difference between universities in implementing religious moderation policies in universities.

Keywords: *Alteration, Implementation, Religious Moderation, Islamic Religious College*

PENDAHULUAN

Ada perbedaan disposisi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTKIN) dalam menjawab strategi pembinaan pengawasan ketat yang diberikan Kementerian Agama. Perbedaan ini tercermin dari adanya pembuatan strategi yang tampak dalam dua hal, yaitu formalisasi sarana untuk melaksanakan latihan keseimbangan yang ketat sebagai lembaga yang berbeda di dekatnya; dan kedua, cara perguruan tinggi menyesuaikan kemungkinan kontrol ketat ke dalam tridharma pendidikan tinggi. Terkait formalisasi metodologi

pelaksanaan, perguruan tinggi tidak semua dapat tanggap secara cepat memutarbalikkan surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pendirian Rumah Moderasi Umat Beragama. Dari total Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang tersebar di seluruh Nusantara hingga 58 organisasi, 32 PTKI telah mendirikan Rumah Moderasi Keagamaan. Sedangkan, 26 perguruan tinggi belum memiliki organisasi Rumah Moderasi Keagamaan yang layak. Selaras dengan itu, pengembangan nilai keseimbangan yang ketat juga dilakukan dengan cara yang berbeda, di mana beberapa alasan mengingatkannya untuk rencana pendidikan dan menjadi salah satu mata pelajaran ujian dan administrasi daerah untuk guru dan siswa. Mengingat reaksi yang tidak konsisten dan cara mengatur teknik, tinjauan diharapkan untuk menilai perbedaan strategi yang diambil oleh perguruan tinggi dalam menerapkan gagasan kontrol yang ketat.

Hingga saat ini, kajian moderasi keagamaan yang dilakukan melalui penelitian difokuskan pada bagaimana mensosialisasikan dan mengkaji moderasi non-sekuler di lembaga pendidikan. Sedangkan kajian tentang unsur-unsur penyebab variasi olahraga, konsep moderasi di lembaga akademik, dan ukuran pilihan yang dibuat dalam metode pembiasaan sekolah banyak siswa unggulan. Berdasarkan hal tersebut, ada 3 pendekatan yang digunakan dalam pembahasan moderasi di atas, terutama dalam memperoleh pengetahuan tentang metode, strategi sosialisasi dan kontekstualisasi: *Pertama*, Lihat moderasi beragama menggunakan jenis topik tertentu.¹ *Kedua*, Lembaga pendidikan giat menyelenggarakan kegiatan untuk mempromosikan moderasi.² *Ketiga*, Penelitian tentang lahirnya politik seputar pembelajaran moderasi beragama terkait dengan isu radikalisme yang merambah dunia pendidikan.³

Seperti yang dijelaskan oleh Saihu dan Marsiti, materi moderasi yang diberikan melalui pembelajaran karakter penting dalam memerangi ide-ide radikal. Berdasarkan ketiga kecenderungan di atas, diketahui bahwa belum banyak kajian tentang moderasi beragama yang membahas tentang perbedaan pilihan lembaga pendidikan dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan dalam penerapan pemikiran moderasi beragama.

¹ Yedi Purwanto, Qowaid Qowaid, and Ridwan Fauzi, "Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum," *Edukasi* 17, no. 2 (2019): 294708; Caswita Caswita, "Kurikulum Tersembunyi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 17, no. 3 (2019); Kasinyo Harto and Tastin, "Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasatiyah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik," *At-Ta'lim*, no. 1 (2019); Hani Hiqmatunnisa, "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Basic Learning," *JIPIS* 29, no. 1 (2020): 27–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jipis.v29i1.546>.

² Yoga Irama and Mukhammad Zamzami, "Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 11, no. 1 (2021): 65–89; Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia," *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.

³ Alexander R Arifianto, "Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism?," *Asian Security* 15, no. 3 (2019): 323–42; Ekawati Ekawati, Mundzier Suparta, and Khaeron Sirin, "Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dalam Deradikalisasi Agama Di Indonesia," *Istiqro* 16, no. 01 (2018): 139–78; Saihu Saihu and Marsiti Marsiti, "Pendidikan Karakter Dalam Upaya Menangkal Radikalisme Di SMA Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2019): 23–54.

Berbagai penelitian telah dilakukan yang membahas tentang penerapan konsep moderasi beragama (PT) di perguruan tinggi. Pertama, internalisasi nilai-nilai moderat melalui pendidikan agama Islam di perguruan tinggi negeri, yang dilakukan oleh Yedi Purwanto, Qowaid, Lisa'diyah Ma'arifataini dan Ridwan Fauzi.⁴ Kajian ini membahas internalisasi nilai-nilai Islam moderasi melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Negeri (PTU). Penting untuk menginternalisasi moderasi beragama, termasuk Islam, dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dengan semboyan Vinneka Tunggal Ika, dan dalam lingkungan yang dinamis di mana kesalahpahaman dapat merusak sendi-sendi persatuan. Tulisan ini menunjukkan pola internalisasi nilai moderasi melalui mata kuliah PAI di UPI Bandung. Materi disesuaikan dengan masukan mahasiswa, target kompetensi instruktur, dan dukungan dari lingkungan kampus UPI. Kurikulum dirancang sesuai dengan ketentuan pendidikan pasca sekolah menengah (PT). Metode internalisasi disampaikan secara tatap muka dalam bentuk ceramah, tutorial, dan seminar. Penilaian dilakukan dengan mengkaji wawasan keislaman lisan dan tulisan berdasarkan laporan berkala dari dosen dan tutor.

Penelitian moderasi beragama di PTKIN sebelumnya pernah dilakukan oleh Hani Hiqmatunnisa dan Ashif Az Zafi dengan judul Menerapkan Nilai Moderasi Islam pada Pembelajaran Fiqh di PTKIN Menggunakan Konsep *Problem Based Learning*.⁵ Dalam artikel ini, nilai-nilai moderat atau Wasatiya penting untuk dipertahankan sebagai kesadaran kolektif umat Islam Indonesia. Hal ini karena nantinya menjadi ikatan kesopanan dalam menghadapi kemajemukan tubuh muslim itu sendiri dan kebhinekaan pihak lain. Pembelajaran fiqh menjadi wadah untuk menanamkan nilai moderasi Islam dengan menghadirkan konsep pembelajaran berbasis masalah yang menuntut siswa untuk membuka wawasan yang luas tentang perbedaan hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Berada di antara diri sendiri dan bersikap moderat dalam menghadapi perbedaan yang muncul. Ada Dengan menanamkan nilai-nilai kesopanan, diharapkan PTKIN akan mempersiapkan umat Islam Indonesia dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan, toleransi dan non-ekstremisme.⁶

Studi lain adalah karya tulis Ekawati, Mundzier Suparta dan Khaeron Sirin, "Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam dalam Deradikaliasi Agama di Indonesia".⁷ Karya tulis berupa artikel ini menjelaskan berkembangnya fenomena radikalisme di beberapa kelompok Muslim telah membuat pihak lain mengkritik Islam, menuduhnya memupuk kekerasan, ekstremisme, berteori dan tindakan subversif lainnya. Bahkan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang sarat dengan kaum intelektual tidak terlepas dari serangan doktrin radikalisme. Maraknya aksi-aksi ini di dunia dan di Indonesia menempatkan Islam sebagai partai politik yang harus disalahkan. Islam, di sisi lain, adalah agama yang mempromosikan moderasi dan toleransi dan menawarkan kenyamanan bagi

⁴ Yedi Purwanto, Qowaid Qowaid, and Ridwan Fauzi, "Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum," *Edukasi* 17, no. 2 (2019): 294-708

⁵ Hani Hiqmatunnisa, "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqh Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Basic Learning," *JIPIS* 29, no. 1 (2020): 27-35, <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jipis.v29i1.546>.

⁶ Kartikowati Triasih, "Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Ahmad Syafii Maarif Dalam Buku Tuhan Menyapa Kita Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam", IAIN Purwokerto, 2020.

⁷ Ekawati Ekawati, Mundzier Suparta, and Khaeron Sirin, "Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dalam Deradikaliasi Agama Di Indonesia," *Istiqro* 16, no. 01 (2018): 139-78

para pengikutnya. Apa yang diuraikan dalam artikel ini dengan demikian memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena radikalisme agama dan upaya perguruan tinggi Islam untuk mencapai deradikalisasi di Indonesia. Moderasi kurikulum dalam deradikalisasi paham keagamaan di tiga perguruan tinggi Islam di Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Surakarta, dan STAIN Kediri, terbukti efektif dalam mencegah dan melawan ekstremisme serta kelembagaan kelembagaan. sistem kurikulum pendidikan.

Lebih lanjut, penelitian Saihu dan Marsiti, fokus pada "Pendidikan Karakter dalam Upaya Menangkal Radikalisme di SMA Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat".⁸ Penelitian ini mengkaji pendidikan Karakter untuk memerangi radikalisme di Negeri 3 Kota Depok menggunakan praktik pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam kurikulum formal dan tersembunyi. Kurikulum formal biasanya diprogram dan dibuat selama IHT di sekolah pada awal tahun ajaran, sedangkan kurikulum tersembunyi tidak dapat memisahkan keduanya untuk pencapaian tujuan pembelajaran seperti penanaman nilai. Oleh karena itu, ikuti ketentuan yang menerapkan kurikulum formal. Sifat keteraturan ditentukan oleh wali kelas di setiap kelas induk. penanaman nilai-nilai karakter disiplin dilakukan pada saat jam pelajaran dengan persetujuan guru mata pelajaran, dan pada saat ulangan atau ulangan harian penanaman nilai karakter kejujuran, penanaman nilai-nilai keramahan, kesopanan, kesopanan Karakter yang benar dipraktikkan dalam salam di dalam dan di luar kelas, dan pengembangan nilai-nilai pribadi Pendidikan agama dimulai dengan berdoa, membiasakan siswa membaca kitab suci masing-masing agama yang dianut, dan menanamkan nilai-nilai pribadi. Menyanyikan lagu wajib kebangsaan setelah sholat dan menanamkan nilai-nilai karakter cinta kebersihan dan peduli lingkungan menyampaikan cinta tanah air. Menjadwalkan pembersihan kelas, belajar tidak dimulai jika kelas kotor, dll. Ini semua adalah bagian dari kurikulum tersembunyi untuk mencapai kurikulum formal berbasis pendidikan karakter.

Sejalan dengan hal ini, Caswita, melihat dari perspektif yang berbeda, yaitu "Kurikulum Tersembunyi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kurikulum yang mengintegrasikan: SD al-Muttaqin Tasikmalaya Kurikulum Tertulis (*Written Curriculum*) dan Kurikulum Tersembunyi (*Hidden Curriculum*). Hasil penelitian ini menunjukkan sekolah pertama Kurang memperhatikan kurikulum tersembunyi pembelajaran PAI, padahal kurikulum tersembunyi sangat penting Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran PAI. Kedua, PAI belajar bahwa Pembelajaran diperoleh dengan menggabungkan kurikulum tertulis dengan kurikulum tersembunyi lebih tepat dan kontekstual.

Kajian lain yang fokus pada sosialisasi dilakukan oleh Alexander R. Arifianto. Studi ini berjudul "Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism?"⁹ Artikel ini mengeksplorasi apakah organisasi dakwah intramural seperti Persatuan Islam Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya radikalisme, atau apakah mereka mempromosikan moderasi politik dan mendorong deradikalisasi. sebagai

⁸ Saihu Saihu and Marsiti Marsiti, "Pendidikan Karakter Dalam Upaya Menangkal Radikalisme Di SMA Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2019): 23–54

⁹ Alexander R Arifianto, "Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism?," *Asian Security* 15, no. 3 (2019): 323–42;

lembaga pencegahan. Perilaku di kalangan muda Muslim di perguruan tinggi. Berdasarkan wawasan dari makalah Moderasi Inklusi, disimpulkan bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tergantung pada kesediaan kelompok-kelompok ini untuk merangkul sistem politik demokrasi Indonesia. Ini menentukan taktik yang telah dipilih kelompok untuk mempromosikan agenda mereka kepada calon anggota. Sementara KAMMI bersedia memoderasi strateginya, HTI tidak mau melakukannya dan Meskipun secara formal menolak ideologi dan ekstremisme, KAMMI secara diam-diam terus memajukan agendanya.

Penelitian tentang telaah atas formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020 dilakukan oleh Yoga Irama dan Mukhammad Zamzami.¹⁰ Artikel ini merupakan jawaban atas keprihatinan masyarakat bahwa saat ini banyak gerakan radikal yang terus melakukan propaganda dan terorisme. Telah diketahui bahwa kesalahan dalam pemahaman agama mengarah pada sikap dan tindakan yang ekstrim. Jika hal ini dibiarkan, niscaya akan menimbulkan keretakan sosial di kemudian hari. Fenomena ini menjadi isu yang patut ditelaah agar tidak menimbulkan kerancuan di kalangan umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah studi tentang upaya dan langkah resmi yang digunakan Kementerian Agama untuk mengarusutamakan moderasi beragama di Indonesia. Dalam kajian ini, rumusan moderasi beragama Depag dikembangkan Kementerian Agama RI dalam beberapa hal, antara lain penguatan moderasi beragama melalui seks pranikah, penguatan pemahaman beragama moderat dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. dilaksanakan melalui jalur tersebut. Sebuah program bimbingan untuk calon pengantin. Moderasi Keagamaan kemudian diperkuat melalui pelatihan kader Penyuluh Moderasi Religi bagi para ustadz muda, mahasiswa, dosen, dan tokoh agama lainnya.

Tentu saja melihat kajian lain tentang moderasi beragama yang menekankan pada moderasi beragama di Indonesia, salah satunya tentang moderasi beragama dalam kebhinekaan Indonesia oleh Agus Ahmadi.¹¹ Indonesia adalah negara multikultural. Keanekaragamannya meliputi budaya, agama, ras, bahasa, Suku, Tradisi, dll. Dalam masyarakat multikultural seperti itu, ketegangan dan bentrokan sering terjadi. Mempengaruhi keharmonisan hidup antar kelompok budaya. Tujuan dari makalah ini adalah Keberagaman Budaya Indonesia, Moderasi Beragama dalam Keberagaman, dan Peran Pendidik Agama mewujudkan perdamaian nasional di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kehidupan multikultural memerlukan pemahaman dan kesadaran multikultural yang menghargai keragaman; dan Kesediaan untuk memperlakukan semua orang dengan adil. Sikap beragama yang moderat diperlukan dengan cara-cara berikut: Mengakui keberadaan orang lain, bersikap toleran, menghargai dan tidak menghargai perbedaan pendapat. Kekuatan akan melalui kekerasan. Peran Pemerintah, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama perlu mensosialisasikan dan mengembangkan moderasi beragama di masyarakat agar tercapai harmoni dan kedamaian

¹⁰ Yoga Irama and Mukhammad Zamzami, "Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 11, no. 1 (2021): 65–89

¹¹ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia," *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.

Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan kurangnya fokus penelitian tentang bagaimana menerapkan konsep moderasi beragama di perguruan tinggi agama Islam. di Perguruan Tinggi Agama Islam. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dan akan membantu menyediakan data untuk peneliti selanjutnya. Apakah kajian ini fokus pada sikap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam menegakkan kebijakan keagamaan yang moderat?

PEMBAHASAN

Locus Ideologi Bernama Moderasi Beragama

Memposisikan moderasi Islam sebagai ideologi pendidikan Islam menimbulkan perdebatan ideologis. Marx, Mannheim, Althusser, Hardimann dan banyak lainnya telah menjelaskan konsep ideologi secara mendalam. Dalam konteks pendidikan, ideologi diartikan oleh O'Neill's Sargent sebagai:¹²

... Ideologi adalah sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Ini terdiri dari seperangkat sikap terhadap institusi dan proses sosial. Ia menawarkan potret dunia sebagaimana mestinya bagi mereka yang mempercayainya. Dan dengan melakukan itu, ia mengatur kompleksitas besar atau kompleksitas dunia menjadi sesuatu yang sangat sederhana dan dapat dimengerti...

Ideologi dalam pendidikan melihat definisi di atas sebagai sistem nilai yang terintegrasi dalam suatu mata pelajaran. Istilah lain yang dapat menggambarkan ideologi pendidikan adalah filsafat pendidikan.

Jelas bahwa ideologi pendidikan berperan dalam membentuk cakrawala pengetahuan di mana guru melakukan tugasnya. Diskusi tentang ideologi pendidikan Islam dilakukan khususnya oleh Ahmadi.¹³ Mungkin kita terlalu sibuk dengan masalah teknis administrasi sehingga penerjemahan ideologis humanisme yang berpusat pada Tuhan ini terhenti pada tataran teoretis. Selain itu, ruang lingkup aktivitas ideologi humanis yang berpusat pada Tuhan masih terlalu luas untuk diukur. Sekarang perlu kejelasan tentang moderasi Islam yang nantinya akan menggantikan ideologi pendidikan Islam.¹⁴

Dalam tulisan ini saya akan mengutip Islam moderat atau Islam moderat seperti yang didefinisikan oleh Suharto:¹⁵

.... Bagi Indonesia, Islam moderat adalah Islam yang tidak ekstrim dan tidak radikal, Islam yang tidak selalu menekankan kekerasan atau mengambil garis keras dalam praktiknya. Kelompok Islam liberal dan kelompok Muslim tidak termasuk dalam kategori Islam moderat selama mereka mengikuti jalur non-Rahma. Islam moderat dicirikan oleh beberapa karakteristik. Toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, mengutamakan dialog, beradaptasi dengan konsep modern termasuk manfaat praktis, berpikir rasional berdasarkan wahyu, menafsirkan teks sesuai

¹² O'neil William F., *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 33.

¹³ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 12.

¹⁴ Toto Suharto, "Gagasan Pendidikan Muhammadiyah Dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat Di Indonesia," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2014): h. 89-90; Sauqi Futaqi, "Konstruksi Moderasi Islam (Wasathiyah) Dalam Kurikulum Pendidikan Islam," in *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 2018, h. 521-530.

¹⁵ Suharto, "Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia," h. 89-90.

konteks, Al-Qur'an dan Sunnah Kami menggunakan ijtihad dalam menafsirkan apa yang tidak termasuk. Islam adalah mereka yang memiliki sikap toleran, rukun dan kooperatif terhadap kelompok agama yang berbeda....

Sejalan dengan pemahaman di atas, Ahmad menjelaskan esensi Islam moderat dalam dua istilah: teologi toleransi dan teologi inklusivitas. Dengan kata lain, Islam moderat tidak pernah menggunakan kebenaran, sehingga tidak terbuka dan eksklusif. Inilah yang saya maksud dengan moderasi Islam sebagai alternatif ideologi pendidikan Islam.

Dalam hal ini, Haryatmoko menggunakan tiga istilah kunci dalam menggambarkan mekanisme ideologis: skematisasi, idealisasi, dan retorika.¹⁶ Proses pertama adalah skematisasi, yang mengubah sistem pemikiran menjadi sistem kepercayaan. Namun, melakukan proses skematisasi dengan baik membutuhkan waktu dan strategi yang tepat. Dan proses terakhir adalah retorika.¹⁷

Moderasi Islam dapat memiliki efek sosial jika ketiga mekanisme ideologis tersebut bekerja dengan baik. Bidang praktik pendidikan mencakup segala hal mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dari pembuat kebijakan hingga mahasiswa, dari kurikulum hingga administrasi pendidikan tinggi. Pendidikan dalam pengertian ini tidak ditafsirkan secara sempit, tetapi memiliki kaitan dengan bidang kehidupan lain yang saling mempengaruhi. Moderasi Islam sebenarnya merupakan bentuk politik budaya yang aktif, sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Implementasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan

Kebijakan pembentukan Lembaga Mediasi Keagamaan telah dirumuskan melalui Surat Edaran Nomor B3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 dari Dirjen Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama tanggal 29 Oktober 2019. Perbedaan. Perbedaan ini juga terlihat pada sistem pendidikan perguruan tinggi Islam yang toleran. Hingga 11 Desember 2020, survei menemukan bahwa dari 58 PTKI, 38 rumah mediasi keagamaan telah didirikan. Data untuk penelitian ini, Hasil penelitian menunjukkan 10 data PTKI secara acak, berhasil dihubungi dan mendapat tanggapan terkait perbedaan tanggapan atas Perintah Direktur. Ke-10 PTKI tersebut menunjukkan bahwa tujuh perguruan tinggi telah mendirikan Rumah Moderasi Keagamaan dan tiga lainnya belum. Tentu saja, universitas yang berbeda memiliki latar belakang yang berbeda. Di antaranya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur yang buruk, dan bahkan kurangnya ketentuan yang tepat terkait dengan arah pergerakan Lembaga Urusan Agama Moderat. Meski demikian, ketiga PTKI tersebut sangat menyadari nilai strategis Rumah Moderasi Umat Beragama untuk mengembangkan gerakan Islam Wasatiyah.

Beberapa PTKI yang mendirikan Rumah Moderasi Keagamaan juga memiliki kebijakan yang berbeda. Misalnya, IAIN Salatiga dan IAIN Kudus tidak menjadikan Rumah Moderasi Keagamaan sebagai fokus penelitian pembelajaran mereka. Demikian juga terkait dengan perbedaan sistem pendidikan toleransi sebagai penguatan nilai-nilai moderasi. Misalnya, pendidikan formal toleransi telah menjadi kurikulum wajib, dengan mata kuliah Islam dan moderasi beragama.

¹⁶ Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia, 2004, h. 62-76.

¹⁷ Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan, ...*, h. 62-76.

Tujuan utama didirikannya Rumah Moderasi Keagamaan adalah untuk menanamkan, mendidik dan memperkuat wacana moderasi beragama sebagai cara untuk mendukung masyarakat sekitar dan berpikir, bertindak dan menerapkan nilai toleransi. Moderasi beragama banyak dipraktikkan dalam dunia pendidikan dan, seperti disebutkan di atas, PTKI sendiri mewajibkan semua perguruan tinggi untuk membentuk badan moderasi beragama.

Hal ini dibuktikan dengan data yang ditemukan bahwa hanya 1 dari 7 perguruan tinggi yang tidak aktif di media sosial. Tapi sayang sekali karena tidak ada aksi nyata di dunia nyata. Tidak jarang para akademisi di kalangan dosen tidak mengetahui keberadaan Lembaga Mediasi Keagamaan di perguruan tinggi mereka. Apalagi pelaksanaan lembaga-lembaga tersebut tidak jelas sasarannya.

Poin utama Lembaga Moderasi Umat Beragama adalah memperkuat nilai toleransi dan mencegah munculnya perilaku radikal. Namun faktanya, berdasarkan data penelitian, sudah banyak yang menerapkan, menanamkan dan menerapkan nilai toleransi sebelum berdirinya Rumah Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi. Mirip dengan UIN Sunan Kalijaga Sebelum terbentuknya Rumah Moderasi Beragama, pantangan beragama pertama kali dipraktikkan oleh Pusat Studi Pancasila 'Pusat Dialog', yang didirikan 15 tahun lalu.

Respon Terhadap Kebijakan Pendirian Rumah Moderas Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan

Studi ini menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki pertimbangan akademik dan sosial yang berbeda mengenai kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan kampus menyebabkan perubahan di sektor lain yang saling terkait. Ada kebijakan untuk mendirikan Rumah Moderasi Keagamaan, ada universitas yang melakukannya dan ada yang tidak. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa universitas memiliki berbagai kekuatan sumber daya. Kebijakan pendirian rumah mediasi keagamaan di perguruan tinggi membuat perbedaan dalam sistem pendidikan. Ini termasuk mendeklarasikan kurikulum ketenangan beragama untuk mahasiswa KKN, menerapkan mata kuliah baru "Islam dan ketenangan beragama" untuk mahasiswa baru, dan menguji langkah-langkah ketenangan beragama. Selain itu, ada Teknik Moderasi Keagamaan, Leaflet, dan Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Moderat.

Pendirian Rumah Moderasi Keagamaan memiliki nilai strategis. Namun saat ini, pendirian Lembaga Moderasi Keagamaan masih menjadi wacana yang sering diperdebatkan. Hal ini dikarenakan fungsi Lembaga Tuning Religi yang didirikan di lingkungan perguruan tinggi masih bersifat formal dan belum dilaksanakannya sehingga menimbulkan perbedaan tanggapan dari pihak PTKI. Apakah sebagai mata pelajaran mandiri atau bagian dari mata pelajaran yang sudah.

Perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing (PTKI) dapat dilihat pada hasil masing-masing. Strategi pengembangan Islam moderat di PTKI tentu berbeda. Setiap PTKI memiliki metode tersendiri yang dianggap lebih efektif dan efisien. Beberapa PTKI sudah mulai mengenalkan Islam moderat ke kampusnya sejak dini, sejak mahasiswa baru masuk universitas, termasuk saat orientasi akademik dan pengenalan kampus di PTK. Hal ini perlu dilakukan agar dapat terus mengikuti penanaman nilai-nilai moderasi beragama di PTKI kedepannya. Kami juga dapat menawarkan berbagai program seperti mini diskusi

tentang nilai moderasi beragama yang diselenggarakan oleh UKM, HMJ, organisasi kampus dan perguruan tinggi agama Islam sebagai kegiatan lanjutan dari acara yang menanamkan nilai seni liberal. (PTKI).

Adanya kebijakan pembentukan Badan Mediasi Keagamaan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama No. B3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 membuat perbedaan. PTKI langsung merespon positif dengan berencana membentuk Forum Moderasi Beragama atau Rumah Moderasi Beragama (RMB). Perlukah renminbi didirikan? Banyak pihak PTKI mempertanyakan hal ini. Terlepas dari pentingnya pendirian renminbi, mereka tetap menanamkan nilai konsep moderasi beragama di perguruan tinggi agamanya masing-masing.

KESIMPULAN

Perlunya penanaman nilai-nilai moderasi beragama di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKI) sebagai bentuk respon tongkat estafet pemahaman moderasi beragama di Indonesia. Tentu saja beragam tanggapan dan tanggapan dari masing-masing Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKI) terkait penetrasi nilai konsep moderasi beragama di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKI). Sikap yang ditunjukkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam yang belum membentuk Rumah Moderasi Umat Beragama (RMB), sederhananya, sudah memiliki gagasan untuk segera mendirikan RMB di setiap PTKI. B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019. Demikian pula tanggapan dan sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing perguruan tinggi agama Islam yang mendirikan RMB berlomba-lomba dalam mempromosikan program atau metode dalam penerapan nilai-nilai dari moderasi agama. Hal ini terjadi karena kita sadar akan sikap dan kondisi yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Adanya kebijakan pendirian rumah moderat keagamaan (RMB) juga membuat perbedaan sikap masing-masing PTKI. Sikap dan reaksi ini muncul dari konteks unik dari berbagai situasi masyarakat. Bukan berarti universitas akan segera mendirikan lembaga moderasi keagamaan atau rumah moderasi keagamaan, sesuai surat edaran direktur Departemen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Menawarkan nilai moderasi beragama dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi mini, dll yang bertujuan untuk menanamkan nilai moderasi beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. 2010. *Ideologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akhmadi, Agus. (2019). "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13 (2): 45–55.
- Arifianto, Alexander R. (2019). "Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism?" *Asian Security* 15 (3): 323–42.
- Caswita, Caswita. "Kurikulum Tersembunyi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 17, no. 3 (2019).
- Ekawati, Ekawati, Mundzier Suparta, and Khaeron Sirin. (2018). "Moderasi Kurikulum

- Perguruan Tinggi Islam Dalam Deradikalisasi Agama Di Indonesia." *Istiqro* 16 (01): 139–78.
- Futaqi, Sauqi. 2018. "Konstruksi Moderasi Islam (Wasathiyah) Dalam Kurikulum Pendidikan Islam." In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 521–30.
- Harto, Kasinyo, and Tastin. (2019). "Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasathiyah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik." *At-Ta'lim* (1).
- Haryatmoko. 2004. *Etika Politik Dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia.
- Hiqmatunnisa, Hani. (2020). "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Basic Learning." *JIPIS* 29 (1): 27–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jipis.v29i1.546>.
- Irama, Yoga, and Mukhammad Zamzami. (2021). "Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 11 (1): 65–89.
- Purwanto, Yedi, Qowaid Qowaid, and Ridwan Fauzi. (2019). "Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum." *Edukasi* 17 (2): 294708.
- Saihu, Saihu, and Marsiti Marsiti. (2019). "Pendidikan Karakter Dalam Upaya Menangkal Radikalisme Di SMA Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1 (1): 23–54.
- Suharto, Toto. "Gagasan Pendidikan Muhammadiyah Dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat Di Indonesia." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2014): 81–109.
- Triasih, Kartikowati. 2020. "Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Ahmad Syafii Maarif Dalam Buku Tuhan Menyapa Kita Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam." Iain Purwokerto.
- William F., O'neil. 2008. *Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.